JURNAL AL BANIN
Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar

Vol. 03, No. 02, Tahun 2025
PISSN : 2988-5116 ;EISSN : 3046-6474
https://ejurnal.darulfattah.ac.id/albanin

Implementasi Kurikulum Merdeka pada Jenjang Pendidikan Dasar Islam

Ahmad Noviansah
STIT Darussalimin NW Praya, NTB, Indonesia
noviansah@stitdarussaliminnw.ac.id

Abstract
The Independent Curriculum is implemented in Islamic elementary education, including Integrated Islamic Elementary Schools and Madrasah Ibtidaiyah (Islamic Elementary Schools), through adaptation of regulations from the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology (Kemendikbudristek) and the Ministry of Religious Affairs, thus integrating the national curriculum with Islamic values. This article aims to map and analyze the policies and implementation of the Independent Curriculum at the Islamic elementary education level. The method used is a literature study with a descriptive-qualitative approach. Literature was searched through Garuda, Google Scholar, and Sinta-indexed journals using keywords related to the Independent Curriculum and Islamic elementary education. Selection was made from Sinta-indexed journal articles or those with DOIs, published between 2021 and 2025, and relevant to the topic; official regulatory documents were also used as policy sources. A total of 28 scientific journal articles and three policy/official documents were analyzed through screening, relevance evaluation, data reduction, theme grouping, and narrative synthesis. The study's findings indicate that the implementation of the Independent Curriculum is gradual and varied, with challenges such as uneven teacher preparedness, limited resources, and a lack of conceptual understanding of Learning Outcomes, Learning Objectives, and the Pancasila Student Profile Strengthening Project. This curriculum also fosters the integration of moral values, religious moderation, and local Islamic wisdom. This study recommends ongoing teacher training, collaborative mentoring between madrasahs, and the development of contextual teaching modules based on Islamic values.
Keywords*: independent curriculum, islamic basic education, madrasah ibtidaiyah, education policy.*

Abstrak
Kurikulum Merdeka diterapkan pada pendidikan dasar Islam, meliputi Sekolah Dasar Islam Terpadu dan Madrasah Ibtidaiyah, melalui adaptasi regulasi Kemendikbudristek dan Kementerian Agama sehingga memiliki karakteristik yang memadukan kurikulum nasional dengan nilai-nilai keislaman. Artikel ini bertujuan memetakan dan menganalisis kebijakan serta implementasi Kurikulum Merdeka pada jenjang pendidikan dasar Islam. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Literatur ditelusuri melalui Garuda, Google Scholar, dan jurnal terindeks Sinta menggunakan kata kunci terkait Kurikulum Merdeka dan pendidikan dasar Islam. Seleksi dilakukan terhadap artikel jurnal terindeks Sinta atau ber-DOI, terbit tahun 2021-2025, dan relevan dengan topik; dokumen regulasi resmi juga digunakan sebagai sumber kebijakan. Sebanyak 28 artikel jurnal ilmiah dan tiga dokumen kebijakan/resmi dianalisis melalui penyaringan, evaluasi relevansi, reduksi data, pengelompokan tema, dan sintesis naratif. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka berjalan bertahap dan bervariasi, dengan kendala kesiapan guru yang belum merata, keterbatasan sarana, serta pemahaman konseptual terhadap Capaian Pembelajaran, Alur Tujuan Pembelajaran, dan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Kurikulum ini juga membuka ruang integrasi nilai akhlak, moderasi beragama, dan kearifan lokal keislaman. Kajian ini merekomendasikan pelatihan guru berkelanjutan, pendampingan kolaboratif antar-madrasah, dan pengembangan modul ajar kontekstual berbasis nilai keislaman.
Kata Kata Kunci: kurikulum merdeka, pendidikan dasar islam, madrasah ibtidaiyah, kebijakan pendidikan.

Pendahuluan

Keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka pada jenjang pendidikan dasar Islam tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan regulasi, melainkan juga sebagai proses kolaboratif yang melibatkan berbagai aktor pendidikan. Pada level kebijakan, Kemendikbudristek dan Kementerian Agama berperan menetapkan kerangka regulasi, pedoman, sosialisasi, dan pendampingan; sementara kantor Kementerian Agama daerah, Dinas Pendidikan, serta pengawas madrasah berfungsi mengawal implementasi di tingkat wilayah. Pada level satuan pendidikan, kepala madrasah atau kepala sekolah berperan sebagai pemimpin pembelajaran yang membentuk tim pengembang kurikulum, memfasilitasi pelatihan guru, mengalokasikan sumber daya, serta melakukan monitoring dan evaluasi. Guru menjadi aktor utama yang menerjemahkan kebijakan kurikulum ke dalam perencanaan pembelajaran, modul ajar, asesmen, dan integrasi nilai-nilai keislaman, sedangkan wakil kepala madrasah bidang kurikulum dan tenaga administrasi mendukung koordinasi akademik serta kelancaran administratif. Selain itu, peserta didik merupakan subjek utama pembelajaran, sementara orang tua, komite madrasah, masyarakat, perguruan tinggi, dan komunitas belajar berperan sebagai pendukung eksternal yang memperkuat relevansi serta keberlanjutan implementasi kurikulum. Oleh karena itu, analisis implementasi Kurikulum Merdeka pada Sekolah Dasar Islam Terpadu dan Madrasah Ibtidaiyah perlu memperhatikan interaksi antara aktor-aktor tersebut, karena keberhasilan kurikulum sangat ditentukan oleh kesiapan, kompetensi, komitmen, dan kolaborasi seluruh pihak (Nurhamidin & Yahiji, 2024).

Perubahan kurikulum merupakan fenomena yang hampir selalu menyertai perjalanan sistem pendidikan nasional Indonesia . Sejak masa kemerdekaan hingga era reformasi, kurikulum senantiasa mengalami pembaruan sebagai respons terhadap dinamika sosial, politik, dan tuntutan mutu sumber daya manusia. Salah satu pembaruan yang paling signifikan dalam satu dekade terakhir adalah kemunculan Kurikulum Merdeka, yang diluncurkan sebagai kelanjutan dari kebijakan Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka lahir sebagai jawaban atas kesenjangan pembelajaran yang meluas akibat pandemi Covid-19, sekaligus sebagai upaya sistemik untuk menggeser paradigma pembelajaran dari yang berorientasi pada penuntasan materi menuju pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan berorientasi pada kompetensi esensial (Alwan,

2023). Secara formal, kebijakan ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran, yang memberikan opsi bagi satuan pendidikan untuk menerapkan Kurikulum Merdeka secara bertahap melalui jalur mandiri belajar, mandiri berubah, atau mandiri berbagi (Kementerian Pendidikan, 2022).

Pada jenjang pendidikan dasar Islam yang mencakup Sekolah Dasar Islam Terpadu di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Madrasah Ibtidaiyah di bawah naungan Kementerian Agama kebijakan Kurikulum Merdeka tidak diberlakukan secara seragam. Kementerian Agama menerbitkan regulasi tersendiri, yaitu Keputusan Menteri Agama Nomor 347 Tahun 2022 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah, sebagai payung hukum penerapan kurikulum tersebut secara khas pada satuan pendidikan madrasah (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022). Kebijakan ini kemudian dikaji lebih lanjut oleh Anas, Ibad, Anam, dan Hariwahyuni yang menegaskan bahwa regulasi tersebut memberikan keleluasaan bagi madrasah untuk mengintegrasikan muatan lokal keislaman ke dalam struktur kurikulum nasional tanpa mengurangi porsi mata pelajaran rumpun Pendidikan Agama Islam yang menjadi ciri khas madrasah (Anas et al., 2023). Kekhasan ini menjadikan implementasi Kurikulum Merdeka pada pendidikan dasar Islam menarik untuk dikaji secara mendalam, sebab satuan pendidikan tidak hanya dituntut memenuhi capaian pembelajaran nasional, tetapi juga menjaga identitas keislaman yang menjadi ruh penyelenggaraan pendidikannya.

Berbagai kajian empiris menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka di jenjang sekolah dasar berjalan dengan capaian yang bervariasi. Sumarsih dan kawan-kawan (2022) menemukan bahwa sekolah penggerak pada jenjang sekolah dasar mengalami proses adaptasi yang tidak mudah pada tahap awal penerapan, khususnya dalam hal penyesuaian mindset pembelajaran yang berpusat pada peserta didik serta sinkronisasi sistem pelaporan hasil belajar. Pada konteks yang lebih spesifik terkait pendidikan agama, Susilowati menyoroti bahwa penerapan Kurikulum Merdeka pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam menuntut guru untuk merancang pembelajaran yang lebih kontekstual dan berbasis proyek, alih-alih sekadar transmisi pengetahuan keagamaan secara tekstual (Susilowati, 2022). Temuan-temuan tersebut

mengindikasikan bahwa keberhasilan implementasi kurikulum tidak semata bergantung pada aspek regulasi, melainkan juga pada kesiapan aktor-aktor pendidikan di tingkat satuan, termasuk kepala madrasah, guru, peserta didik, dan orang tua.

Meskipun kajian tentang Kurikulum Merdeka telah cukup banyak dilakukan, sebagian besar penelitian masih terfokus pada jenjang sekolah dasar umum atau sekolah menengah, sementara kajian yang secara khusus memetakan kebijakan dan implementasi pada jenjang pendidikan dasar Islam baik Sekolah Dasar Islam Terpadu maupun Madrasah Ibtidaiyah masih tersebar dan belum disintesis secara komprehensif. Padahal, karakteristik ganda pendidikan dasar Islam, yaitu memenuhi standar kurikulum nasional sekaligus mempertahankan corak keislaman, menghadirkan dinamika implementasi yang berbeda dibandingkan sekolah umum, sebagaimana ditegaskan oleh Fauzi bahwa guru Pendidikan Agama Islam di sekolah dasar menghadapi problematika tersendiri dalam mengharmonisasikan tuntutan Capaian Pembelajaran dengan muatan nilai-nilai keagamaan yang bersifat afektif dan tidak selalu terukur melalui asesmen kognitif (Fauzi, 2023). Oleh karena itu, artikel ini disusun untuk mengisi kesenjangan tersebut melalui pendekatan literature review yang mensintesis temuan-temuan penelitian terdahulu mengenai kebijakan dan implementasi Kurikulum Merdeka pada jenjang pendidikan dasar Islam.

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini dirumuskan untuk menjawab tiga pertanyaan penelitian, yaitu: (1) bagaimana konstruksi kebijakan Kurikulum Merdeka pada jenjang pendidikan dasar Islam ditinjau dari regulasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Agama; (2) bagaimana pola implementasi Kurikulum Merdeka pada Sekolah Dasar Islam Terpadu dan Madrasah Ibtidaiyah berdasarkan temuan penelitian terdahulu; dan (3) apa saja tantangan serta strategi yang relevan untuk memperkuat implementasi kurikulum tersebut pada jenjang pendidikan dasar Islam. Melalui tiga pertanyaan tersebut, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian kebijakan kurikulum pada pendidikan Islam, sekaligus kontribusi praktis bagi kepala madrasah, guru, dan pemangku kebijakan dalam merumuskan strategi implementasi yang lebih adaptif terhadap karakteristik satuan pendidikan dasar Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Studi pustaka merupakan serangkaian kegiatan penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan, pembacaan, pencatatan, dan analisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian tanpa melakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan (Adlini et al., 2022). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi, memetakan, dan menyintesis berbagai temuan penelitian terdahulu mengenai kebijakan dan implementasi Kurikulum Merdeka pada jenjang pendidikan dasar Islam.

Penelusuran literatur dilakukan melalui tiga sumber utama, yaitu Google Scholar, Garuda, dan jurnal nasional yang terindeks Sinta. Proses pencarian menggunakan kombinasi kata kunci, antara lain "Kurikulum Merdeka", "implementasi Kurikulum Merdeka", "pendidikan dasar Islam", "Madrasah Ibtidaiyah", dan "Sekolah Dasar Islam Terpadu". Kata kunci tersebut digunakan secara terpisah maupun dikombinasikan untuk memperoleh literatur yang sesuai dengan fokus penelitian. Penelusuran difokuskan pada artikel ilmiah yang diterbitkan dalam rentang tahun 2021-2025 serta dokumen kebijakan resmi yang berkaitan dengan penerapan Kurikulum Merdeka.

Seleksi literatur dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, identifikasi, yaitu mengumpulkan seluruh artikel yang ditemukan dari berbagai sumber pencarian berdasarkan kesesuaian kata kunci. Kedua, penyaringan, yaitu memeriksa judul dan abstrak untuk menghilangkan artikel yang tidak relevan dan artikel duplikat. Ketiga, pemeriksaan kelayakan, yaitu membaca isi artikel secara lebih mendalam untuk memastikan kesesuaiannya dengan fokus penelitian. Keempat, penetapan sumber akhir, yaitu memilih literatur yang memenuhi seluruh kriteria inklusi untuk dianalisis.

Kriteria inklusi yang digunakan meliputi: (1) artikel merupakan publikasi jurnal ilmiah nasional yang terindeks Sinta atau memiliki DOI resmi; (2) diterbitkan pada rentang tahun 2021–2025; (3) membahas Kurikulum Merdeka, khususnya kebijakan dan implementasinya pada jenjang pendidikan dasar, termasuk Sekolah Dasar Islam Terpadu dan Madrasah Ibtidaiyah; serta (4) memiliki informasi dan temuan yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Selain artikel jurnal, penelitian ini juga menggunakan dokumen regulasi resmi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Agama sebagai sumber analisis kebijakan.

Adapun artikel populer, opini nonilmiah, publikasi duplikat, dan artikel yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian dikeluarkan dari proses analisis.

Berdasarkan proses seleksi tersebut, sumber akhir yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 28 artikel jurnal ilmiah dan 3 dokumen kebijakan atau dokumen resmi. Dengan demikian, terdapat 31 sumber literatur yang dianalisis dalam penelitian ini. Jumlah tersebut merupakan hasil akhir seleksi berdasarkan kesesuaian tema, rentang publikasi, dan kelengkapan informasi yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) secara deskriptif-kualitatif. Setiap sumber yang terpilih dibaca dan diidentifikasi untuk menemukan informasi penting yang berkaitan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, informasi tersebut direduksi dan dikelompokkan ke dalam empat tema utama, yaitu: (1) konstruksi kebijakan Kurikulum Merdeka pada pendidikan dasar Islam; (2) pola implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar Islam Terpadu dan Madrasah Ibtidaiyah; (3) problematika dan tantangan implementasi; serta (4) strategi penguatan implementasi Kurikulum Merdeka. Temuan dari setiap sumber kemudian dibandingkan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan kecenderungan hasil penelitian. Tahap akhir dilakukan melalui sintesis naratif untuk menghasilkan gambaran yang sistematis dan komprehensif mengenai kebijakan serta implementasi Kurikulum Merdeka pada jenjang pendidikan dasar Islam.

Hasil dan Pembahasan

Konstruksi Kebijakan Kurikulum Merdeka pada Pendidikan Dasar Islam

Secara konseptual, Kurikulum Merdeka dibangun di atas tiga pilar utama, yaitu pembelajaran intrakurikuler yang dilaksanakan secara berdiferensiasi sesuai kebutuhan belajar peserta didik, projek penguatan Profil Pelajar Pancasila yang bersifat interdisipliner, dan pembelajaran ekstrakurikuler yang disesuaikan dengan minat peserta didik serta sumber daya satuan pendidikan (Alwan, 2023). Struktur kurikulum ini dijabarkan ke dalam tiga fase pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar, yaitu Fase A untuk kelas I dan II, Fase B untuk kelas III dan IV, serta Fase C untuk kelas V dan VI, yang masing-masing memiliki Capaian Pembelajaran tersendiri sebagai acuan

penyusunan Alur Tujuan Pembelajaran oleh guru.

Pada Madrasah Ibtidaiyah, struktur tersebut diadopsi dengan penyesuaian melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 347 Tahun 2022, yang secara khusus mengatur muatan mata pelajaran rumpun Pendidikan Agama Islam meliputi Al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab agar tetap menjadi ciri khas madrasah di tengah penerapan struktur kurikulum nasional yang baru (Kementerian Agama RI, 2022). Anas dan kawan-kawan menegaskan bahwa kebijakan ini memberikan ruang otonomi kurikulum operasional bagi madrasah tanpa menghilangkan identitas keislamannya, sehingga madrasah tetap dapat mengembangkan kurikulum yang relevan dengan visi, misi, dan karakteristik lokal masing-masing satuan pendidikan (Anas et al., 2023). Kebijakan tersebut juga memberikan opsi bagi madrasah untuk memilih antara melanjutkan Kurikulum 2013 dengan penyesuaian minimal atau mengadopsi Kurikulum Merdeka secara penuh, sehingga transisi kebijakan berlangsung secara gradual dan tidak memaksakan keseragaman waktu penerapan di seluruh madrasah.

Berbeda dengan Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Islam Terpadu pada umumnya mengacu langsung pada regulasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, namun tetap memiliki keleluasaan untuk mengintegrasikan muatan keislaman ke dalam kurikulum operasional satuan pendidikan sebagai bagian dari kekhasan lembaga. Thana dan Hanipah menjelaskan bahwa Kurikulum Merdeka pada jenjang sekolah dasar dirancang untuk menjawab tantangan pendidikan abad ke-21 melalui penguatan literasi, numerasi, dan karakter, sehingga sekolah berbasis keagamaan memiliki peluang untuk memadukan tuntutan tersebut dengan penguatan nilai spiritual dan moral peserta didik (Thana & Hanipah, 2023). Dengan demikian, konstruksi kebijakan Kurikulum Merdeka pada pendidikan dasar Islam pada dasarnya bersifat dua lapis: lapisan kebijakan nasional yang menetapkan kerangka umum, dan lapisan kebijakan turunan atau kebijakan internal satuan pendidikan yang mengadaptasi kerangka tersebut sesuai dengan visi keislaman masing-masing lembaga.

Pola Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar Islam dan Madrasah Ibtidaiyah

Temuan dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka pada jenjang pendidikan dasar Islam umumnya dimulai dengan pembentukan komite atau tim pengembang kurikulum di tingkat satuan pendidikan, yang bertugas menyusun Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan, Alur Tujuan Pembelajaran, dan modul ajar. Sumarsih dan kawan-kawan mencatat bahwa pada sekolah penggerak, tim tersebut biasanya terdiri atas guru kelas rendah, guru kelas tinggi, guru mata pelajaran pendidikan jasmani, guru pendidikan agama, kepala sekolah, serta pengawas pembina yang berperan mendampingi proses adaptasi kurikulum baru (Sumarsih et al., 2022). Pola serupa juga ditemukan pada Madrasah Ibtidaiyah, di mana Alwan menemukan bahwa penerapan Kurikulum Merdeka diawali dengan pemahaman guru terhadap karakter dan potensi peserta didik sebagai dasar pemilihan materi esensial, dilanjutkan dengan penyusunan peta kemampuan siswa untuk mempermudah pengelompokan dan diferensiasi pembelajaran (Alwan, 2023).

Pada aspek pembelajaran Pendidikan Agama Islam secara khusus, Aminah dan Sya'bani menemukan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka mendorong guru untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih variatif, seperti pembelajaran berbasis proyek keagamaan dan pembiasaan ibadah harian, dibandingkan dengan pendekatan hafalan yang dominan pada kurikulum sebelumnya (Aminah & Sya'bani, 2023). Hal ini diperkuat oleh temuan Habibah yang menegaskan bahwa Kurikulum Merdeka menuntut guru Pendidikan Agama Islam di sekolah dasar untuk meningkatkan kompetensi digitalnya, mengingat banyak instrumen asesmen diagnostik dan platform pembelajaran, seperti Platform Merdeka Mengajar, disediakan dalam format digital yang memerlukan literasi teknologi memadai (Habibah, 2022).

Perbandingan antara Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka pada satuan pendidikan dasar juga dikaji oleh Angga dan kawan-kawan di Kabupaten Garut, yang menemukan bahwa Kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas lebih besar dalam penyusunan rencana pembelajaran, dari yang sebelumnya berupa dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dengan banyak komponen administratif menjadi modul ajar yang lebih ringkas dan berorientasi pada tujuan pembelajaran (Angga et al., 2023). Penyederhanaan administratif tersebut dipandang oleh sebagian guru sebagai peluang

untuk lebih fokus pada substansi pembelajaran, meskipun pada tahap awal implementasi kerap menimbulkan kebingungan karena format baru yang belum familiar.

Praktik Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) menjadi salah satu elemen implementasi yang paling banyak disorot dalam literatur. Angga, Hernawan, dan Mulyati menemukan bahwa pelaksanaan P5 di sekolah dasar umumnya diintegrasikan dengan tema-tema kearifan lokal dan gaya hidup berkelanjutan, namun pada satuan pendidikan Islam, tema tersebut sering dipadukan dengan nilai-nilai keagamaan, seperti kepedulian sosial berbasis semangat gotong royong dalam ajaran Islam (Angga et al., 2022). Namun demikian, tidak semua satuan pendidikan telah melaksanakan P5 secara optimal; sebagian sekolah dasar masih melaksanakan kegiatan yang menyerupai proyek tanpa mengikuti tahapan perencanaan proyek yang utuh, sebagaimana ditemukan pada studi kasus di sebuah sekolah dasar di Kabupaten Cilacap yang baru menerapkan kegiatan bertema gizi sebagai bentuk pendekatan awal terhadap P5 (Wahyuni, 2023).

Kesiapan Guru dan Ketersediaan Sumber Daya

Kesiapan guru merupakan faktor determinan yang secara konsisten disebut dalam berbagai penelitian sebagai penentu keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka. Romadhon dan kawan-kawan, melalui studi kasus di sebuah sekolah dasar negeri, menemukan bahwa guru pada umumnya berada pada level kesiapan yang cukup memahami konsep dasar kurikulum, namun masih memerlukan pendampingan intensif dalam penyusunan Alur Tujuan Pembelajaran dan modul ajar berdiferensiasi (Romadhon et al., 2023). Kesiapan dalam aspek asesmen juga menjadi perhatian khusus, sebagaimana ditemukan oleh Rosidah, Pramulia, dan Susiloningsih yang mengungkapkan bahwa banyak guru sekolah dasar belum sepenuhnya siap dalam melaksanakan asesmen autentik karena masih terbiasa dengan pola penilaian berbasis tes tertulis pada kurikulum sebelumnya (Rosidah et al., 2021).

Pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah, hambatan kesiapan guru relatif lebih kompleks karena guru dituntut menguasai baik paradigma pembelajaran baru maupun kompetensi pedagogik keagamaan. Zulaiha dan kawan-kawan menemukan bahwa problematika utama yang dihadapi guru dalam menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar berkaitan dengan keterbatasan pelatihan tatap muka, minimnya pemahaman

konseptual mengenai perbedaan filosofis antara Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka, serta keterbatasan waktu untuk merancang pembelajaran berbasis proyek di tengah beban mengajar yang tetap tinggi (Zulaiha & et al., 2022). Kondisi ini sejalan dengan temuan pada sekolah dasar di Kecamatan Majenang yang menunjukkan bahwa ketidakjelasan kepemimpinan sekolah turut memperlambat proses implementasi kurikulum, sebab arah kebijakan operasional satuan pendidikan sangat bergantung pada inisiatif kepala sekolah (Wahyuni, 2023).

Selain aspek kompetensi guru, keterbatasan sarana dan prasarana turut menjadi kendala yang berulang disebutkan dalam literatur. Ketersediaan jaringan internet yang memadai, misalnya, menjadi prasyarat penting mengingat sebagian besar dokumen Capaian Pembelajaran, contoh modul ajar, dan pelatihan mandiri guru diakses melalui Platform Merdeka Mengajar yang berbasis daring. Pada satuan pendidikan di wilayah dengan akses teknologi terbatas, termasuk sejumlah madrasah di kawasan pedesaan, kendala ini memperlambat proses pemahaman guru terhadap struktur kurikulum baru dan berdampak pada penerapan yang belum optimal di seluruh kelas (Fauzi, 2023). Studi Ujang Cepi Barlian dan kawan-kawan menambahkan bahwa peningkatan mutu pendidikan melalui Kurikulum Merdeka hanya dapat berjalan optimal apabila diikuti oleh penguatan tata kelola sekolah, termasuk dukungan sarana pembelajaran dan pengembangan profesional guru secara berkesinambungan lebih lagi pada fasilitas yang memadahi (Barlian et al., 2022).

Integrasi Profil Pelajar Pancasila dengan Nilai-Nilai Keislaman

Salah satu ciri khas implementasi Kurikulum Merdeka pada satuan pendidikan Islam adalah upaya mengintegrasikan enam dimensi Profil Pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif dengan nilai-nilai ajaran Islam yang telah menjadi identitas satuan pendidikan. Aziz dan Hasanah menemukan bahwa penguatan Profil Pelajar Pancasila di Madrasah Ibtidaiyah dilakukan melalui pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islam, seperti pembiasaan salat berjamaah, tadarus Al-Qur'an, dan kegiatan sosial keagamaan, yang secara langsung mendukung pencapaian dimensi keimanan dan akhlak mulia dalam Profil Pelajar Pancasila (Aziz & Hasanah, 2022).

Pada jenjang yang lebih tinggi namun relevan secara konseptual, Rahmadani dan Kamaludin menegaskan bahwa integrasi nilai-nilai Profil Pelajar Pancasila dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam memerlukan pemahaman guru yang komprehensif terhadap keenam dimensi tersebut, sebab kegagalan memahami esensinya berisiko menjadikan integrasi tersebut hanya bersifat administratif tanpa berdampak nyata terhadap perilaku peserta didik (Rahmadani & Kamaludin, 2023). Sejalan dengan itu, Nurhantara dan Utami menemukan bahwa implementasi Profil Pelajar Pancasila dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti berbasis Merdeka Belajar efektif diwujudkan melalui pembelajaran berdiferensiasi yang memperhatikan gaya belajar peserta didik, dipadukan dengan penguatan nilai spiritual melalui refleksi dan kontemplasi keagamaan pada akhir setiap unit pembelajaran (Nurhantara & Utami, 2023).

Isu moderasi beragama juga muncul sebagai tema penting dalam integrasi Profil Pelajar Pancasila pada satuan pendidikan Islam. Azhari dan kawan-kawan menemukan bahwa Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila yang mengangkat tema kebinekaan global memberikan dampak positif terhadap sikap moderasi beragama peserta didik, sebab peserta didik dibiasakan berdialog dan berkolaborasi dengan teman yang memiliki latar belakang berbeda dalam kerangka proyek bersama (Azhari et al., 2024). Basri, Kurniaty, dan Krisnan menambahkan perspektif filosofis bahwa nilai-nilai transendental dalam Pancasila pada dasarnya selaras dengan pandangan dunia Islam mengenai ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga integrasi antara Profil Pelajar Pancasila dan nilai keislaman tidak menimbulkan pertentangan prinsipil, melainkan saling menguatkan (Basri & Krisnan, 2021).

Selain moderasi beragama, kearifan lokal juga menjadi ruang integrasi yang relevan. Handayani dan kawan-kawan menemukan bahwa madrasah dan sekolah berbasis Islam di berbagai daerah memanfaatkan kearifan budaya lokal, seperti tradisi gotong royong dan kesenian daerah bernuansa Islami, sebagai konteks pembelajaran dalam Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, sehingga peserta didik tidak hanya memahami nilai kebangsaan secara abstrak tetapi juga secara kontekstual sesuai lingkungan sosial mereka (Handayani et al., 2022). Pendekatan berbasis nilai spiritual dari sumber ajaran Islam, seperti kandungan Al-Qur'an, juga dijadikan basis penguatan karakter, sebagaimana ditunjukkan oleh Dedi S. dan Suriadi yang menganalisis nilai-nilai

kesabaran, ribat, dan takwa dalam Surah Ali Imran ayat 200 sebagai sumber inspirasi model pendidikan karakter integratif yang relevan dengan penguatan Profil Pelajar Pancasila (S. & Suriadi, 2023).

Problematika dan Tantangan Implementasi

Sintesis dari berbagai literatur menunjukkan bahwa tantangan implementasi Kurikulum Merdeka pada jenjang pendidikan dasar Islam dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori utama, yaitu tantangan konseptual, tantangan sumber daya manusia, tantangan sarana-prasarana, dan tantangan pada aspek peserta didik. Pada tantangan konseptual, Anjeliani dan kawan-kawan menemukan bahwa sebagian guru masih mengalami kebingungan dalam membedakan antara Capaian Pembelajaran, Tujuan Pembelajaran, dan Alur Tujuan Pembelajaran, sehingga penyusunan modul ajar menjadi tidak sistematis dan cenderung meniru contoh modul dari platform digital tanpa penyesuaian konteks satuan pendidikan (Anjeliani et al., 2024).

Pada tantangan sumber daya manusia, temuan Jumadia menunjukkan bahwa perbedaan tingkat penguasaan teknologi antar guru menjadi salah satu penyebab ketidakmerataan kualitas implementasi kurikulum di berbagai satuan pendidikan dasar, sebab guru dengan literasi digital rendah kesulitan mengakses dan memanfaatkan modul ajar serta instrumen asesmen digital yang disediakan pemerintah (Jumadia, 2025). Pada aspek peserta didik, tantangan yang muncul umumnya berkaitan dengan motivasi belajar yang belum optimal, terutama pada peserta didik yang sebelumnya terbiasa dengan pola pembelajaran satu arah, sehingga memerlukan waktu adaptasi untuk terbiasa dengan pembelajaran yang menuntut inisiatif dan kemandirian yang lebih besar (Fauzi, 2023).

Tantangan lain yang bersifat lebih spesifik pada satuan pendidikan Islam adalah risiko dominasi orientasi akademik-kognitif dalam sistem asesmen digital yang berpotensi mempersempit ruang penilaian terhadap dimensi afektif dan spiritual peserta didik. Sebagaimana disinggung sebelumnya, penilaian terhadap pembiasaan ibadah dan akhlak keseharian tidak selalu dapat direpresentasikan secara memadai melalui rubrik asesmen formatif dan sumatif standar, sehingga guru pendidikan agama perlu mengembangkan instrumen penilaian tambahan yang lebih kontekstual, misalnya melalui jurnal refleksi ibadah atau observasi perilaku harian, agar capaian pembelajaran keagamaan dapat terpantau secara utuh.

Strategi Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka pada Pendidikan Dasar Islam

Berdasarkan berbagai tantangan yang telah diidentifikasi, literatur juga menawarkan sejumlah strategi penguatan implementasi. Pertama, penguatan kapasitas guru melalui pelatihan berkelanjutan dan pendampingan kolaboratif. Alwan menekankan pentingnya peran Kelompok Kerja Madrasah sebagai wadah komunikasi dan diskusi antar-madrasah untuk menyelenggarakan pelatihan yang memperkuat pengetahuan dan keterampilan guru dalam menerapkan Kurikulum Merdeka secara berkesinambungan, bukan hanya melalui pelatihan satu kali yang bersifat seremonial (Alwan, 2023). Kedua, pengembangan modul ajar kontekstual berbasis nilai keislaman melalui pelatihan penulisan modul, sebagaimana dipraktikkan dalam program pengabdian yang dikaji oleh Akbar dan kawan-kawan, yang menunjukkan bahwa pelatihan penyusunan modul ajar dengan integrasi nilai karakter Profil Pelajar Pancasila secara signifikan meningkatkan kemampuan guru sekolah dasar dalam merancang pembelajaran yang relevan dengan konteks lokal dan nilai-nilai yang dianut peserta didik (Akbar et al., 2024).

Ketiga, penguatan tata kelola dan kepemimpinan kepala satuan pendidikan sebagai motor penggerak implementasi kurikulum di tingkat lembaga. Sebagaimana ditunjukkan pada temuan sebelumnya bahwa ketidakjelasan kepemimpinan sekolah dapat memperlambat implementasi, maka penguatan kompetensi manajerial kepala sekolah dan kepala madrasah, termasuk kemampuan menyusun Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan yang partisipatif, menjadi prioritas strategis. Keempat, optimalisasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila berbasis tema keislaman lokal yang dirancang secara sistematis, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, sehingga proyek tidak lagi berhenti pada aktivitas seremonial tetapi benar-benar berkontribusi pada pembentukan karakter peserta didik sesuai enam dimensi Profil Pelajar Pancasila yang telah dipadukan dengan nilai-nilai keislaman (Angga et al., 2022).

Kelima, penguatan instrumen asesmen yang mengakomodasi dimensi spiritual dan afektif peserta didik pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, sebagai respons atas keterbatasan asesmen kognitif standar dalam mengukur pembiasaan ibadah dan akhlak. Keenam, sinergi antara satuan pendidikan dengan orang tua dan masyarakat sekitar dalam mendukung keberlanjutan proses pembelajaran, khususnya dalam

pembiasaan nilai-nilai keislaman di luar jam sekolah, mengingat pembentukan karakter tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada sekolah tanpa dukungan lingkungan keluarga. Keenam strategi tersebut, apabila diterapkan secara terpadu, berpotensi mempercepat pencapaian tujuan Kurikulum Merdeka pada jenjang pendidikan dasar Islam tanpa mengabaikan kekhasan keislaman yang menjadi identitas satuan pendidikan.

Secara keseluruhan, sintesis temuan di atas menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka pada jenjang pendidikan dasar Islam bukanlah proses yang berjalan linear dan seragam, melainkan proses adaptif yang sangat dipengaruhi oleh konteks lokal masing-masing satuan pendidikan, baik dari aspek kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan sarana, maupun kapasitas kepemimpinan lembaga. Namun, di tengah beragam tantangan tersebut, kurikulum ini juga membuka peluang besar bagi penguatan identitas keislaman satuan pendidikan melalui integrasi nilai-nilai akhlak, moderasi beragama, dan kearifan lokal ke dalam kerangka Profil Pelajar Pancasila, sehingga pendidikan dasar Islam tidak hanya menjadi objek kebijakan nasional, tetapi juga turut memberi warna dan kontribusi bagi pengembangan wajah pendidikan karakter Indonesia secara lebih luas.

Simpulan

Berdasarkan hasil kajian pustaka, implementasi Kurikulum Merdeka pada jenjang pendidikan dasar Islam, khususnya Sekolah Dasar Islam Terpadu dan Madrasah Ibtidaiyah, dilaksanakan secara bertahap melalui kebijakan nasional dan regulasi Kementerian Agama dengan tetap mempertahankan identitas keislaman. Implementasinya memberikan fleksibilitas dalam pembelajaran berdiferensiasi, penyusunan modul ajar, serta integrasi nilai-nilai Islam, moderasi beragama, dan kearifan lokal dalam penguatan Profil Pelajar Pancasila.

Namun, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala, terutama ketidaksiapan kompetensi guru, keterbatasan literasi digital dan sarana prasarana, lemahnya pemahaman terhadap komponen kurikulum, serta keterbatasan asesmen dalam mengukur aspek afektif dan spiritual peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan guru berkelanjutan, pendampingan kolaboratif, penguatan kepemimpinan satuan pendidikan, pengembangan modul ajar kontekstual, dan instrumen asesmen

yang mencakup aspek kognitif, afektif, serta spiritual. Dengan strategi tersebut, Kurikulum Merdeka berpotensi mewujudkan pendidikan dasar Islam yang adaptif, berkualitas, dan berorientasi pada pembentukan karakter peserta didik secara holistik.

Daftar Pustaka

Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, *6*(1), 974–980. https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394

Akbar, S., Oktarianto, M. L., Bintartik, L., Yuniawatika, Pradana, D. F., & Kusumawardani, D. S. (2024). Pelatihan Penyusunan Modul Ajar dengan Integrasi Nilai Karakter Pelajar Pancasila pada Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. *Jurnal Abdidas*, *5*(5), 720–727. https://doi.org/10.31004/abdidas.v5i5.1054

Alwan, M. (2023). Kebijakan Implmentasi Kurikulum Merdeka Belajar Pada Jenjang Madrasah Ibtidaiyah. *Jurnal Al-Muta'aliyah: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, *3*(2), 63–69. https://doi.org/10.51700/mutaaliyah.v3i2.536

Aminah, I. A. N., & Sya'bani, M. A. Y. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi*, *6*(2), 293–303. https://doi.org/10.32529/al-ilmi.v6i2.2804

Anas, A. Z. I., Anam, N. K., & Hariwahyuni, F. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka Madrasah Ibtidaiyah (MI): Studi Analisis Kebijakan KMA RI No. 347 Tahun 2022. *Journal of Creative Student Research (JCSR)*, *1*(1), 99–116.

Angga, A., Hernawan, A. H., & Mulyati, T. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) di Sekolah Dasar dalam Mengembangkan Profil Pelajar Pancasila. *Jurnal Elementaria Edukasia*, *6*(3), 1290–1299. https://doi.org/10.31949/jee.v6i3.6107

Angga, A., Suryana, C., Nurwahidah, I., Hernawan, A. H., & Prihantini. (2022). Komparasi Implementasi Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar Kabupaten Garut. *Jurnal Basicedu*, *6*(4), 5877–5889. https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3149

Anjeliani, S., Yanti, L. D., Aisyah, S., Saputra, M. R., Khoirunnisa, & Risdalina. (2024). Analisis Problematika Penerapan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. *Jurnal Inovasi, Evaluasi Dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*, *4*(2), 294–302. https://doi.org/10.54371/jiepp.v4i2.416

Azhari, P., Shinta, J., Daris, A., Nurfadillah, A., & Ramadhan, S. (2024). Konsep Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5): Analisis Dampaknya terhadap Sikap Moderasi Beragama Peserta Didik di Sekolah. *Ta'lim: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, *7*(2), 307–324. https://doi.org/10.52166/talim.v7i2.6702

Aziz, A., & Hasanah, U. (2022). Penguatan Profil Pelajar Pancasila melalui Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Islam di Madrasah Ibtidaiyah. *Journal of Education and Learning Sciences*, *2*(2), 1–14. https://doi.org/10.56404/jels.v2i2.19

Barlian, U. C., Solekah, S., & Rahayu, P. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Journal of Educational and Language Research*, *1*(12). https://doi.org/10.53625/joel.v1i12.3015

Basri, Y. K., & Krisnan, J. (2021). Nilai-Nilai Transedental dalam Pancasila Sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia: Perspektif dari Seorang Muslim. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, *1*(2), 111–120. https://doi.org/10.47268/pamali.v1i2.620

Fauzi, M. N. (2023). Problematika Guru Mengimplementasi Kurikulum Merdeka Belajar pada Pembelajaran PAI di Sekolah Dasar. *Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, *7*(4), 1661–1674. https://doi.org/10.35931/am.v7i4.2688

Habibah, M. (2022). Pengembangan Kompetensi Digital Guru Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar dalam Kerangka Kurikulum Merdeka. *Sittah: Journal of Primary Education*, *3*(1), 76–89.

Handayani, S. D., Irawan, A., Febriyanti, C., & Kencanawaty, G. (2022). Mewujudkan Pelajar Pancasila dengan Mengintegrasikan Kearifan Budaya Lokal dalam Kurikulum Merdeka. *Ilma Jurnal Pendidikan Islam*, *1*(1), 76–81.

Jumadia. (2025). Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar: Tantangan dan Solusi. *Edu Research*, *6*(1), 168–175. https://doi.org/10.47827/jer.v6i1.514

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). *Keputusan Menteri Agama Nomor 347 Tahun 2022 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah*. Kementerian Agama RI.

Kementerian Agama RI. (2022). *Kurikulum Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. https://www.kemenag.go.id/kurikulum-pgmi

Kementerian Pendidikan, K., Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2022). *Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran*. Kemendikbudristek.

Nurhamidin, C. P., & Yahiji, K. (2024). Tanggungjawab Terhadap Kurikulum Merdeka Belajar di Madrasah. *Turabian: Jurnal Pendidikan Islam*, *2*(2), 86–100. https://doi.org/10.33558/turabian.v2i2.9658

Nurhantara, Y. R., & Utami, R. D. (2023). Implementasi Profil Pelajar Pancasila dalam Pembelajaran PAI dan Budi Pekerti Berbasis Merdeka Belajar. *Jurnal Elementaria Edukasia*, *6*(2), 736–746. https://doi.org/10.31949/jee.v6i2.5142

Rahmadani, M. I., & Kamaludin, M. (2023). Integrasi Nilai-Nilai Profil Pelajar Pancasila dalam Pembelajaran PAI: Studi Kasus di SMAN 2 Tanjung. *Indonesia Islamic Education Journal*, *1*(2), 69–80.

Romadhon, K., Rokhimawan, M. A., Fajriyani, N. A., Wibowo, Y. R., & Ayuningtyas, D. R. (2023). Analisis Kesiapan Guru dalam Implementasi Kurikulum Merdeka: Studi Kasus di SD Negeri 1 Ulak Kedondong. *Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, *7*(2), 1885–1897. https://doi.org/10.35931/am.v7i2.2239

Rosidah, C. T., Pramulia, P., & Susiloningsih, W. (2021). Analisis Kesiapan Guru Mengimplementasikan Asesmen Autentik dalam Kurikulum Merdeka Belajar. *Jurnal Pendidikan Dasar*, *12*(2). https://doi.org/10.21009/JPD.012.08

S., D. & Suriadi. (2023). Penguatan Profil Pelajar Pancasila melalui Integrasi Nilai Spiritual dalam Pendidikan Karakter Guna Menumbuhkan Jiwa Entrepreneur: Ditinjau dalam QS. Ali Imran: 200. *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies*, *6*(1), 472–487. https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i1.506

Sumarsih, I., Marliyani, T., Hadiyansah, Y., Hernawan, A. H., & Prihantini. (2022). Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, *6*(5), 8248–8258. https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i5.3216

Susilowati, E. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam. *Al-Miskawaih: Journal of Science Education*, *1*(1), 115–132.

Thana, P. M., & Hanipah, S. (2023). Kurikulum Merdeka: Transformasi Pendidikan SD untuk Menghadapi Tantangan Abad ke-21. *Prosiding Konferensi Ilmiah Dasar*, *4*, 281–288.

Wahyuni, S. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmiah Kontekstual*, *4*(2), 67–75. https://doi.org/10.46772/kontekstual.v4i02.995

Zulaiha, S. & et al. (2022). Problematika Guru dalam Menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar*, *9*(2), 163–177.